

**TERM OF REFERENCE**  
**Focus Group Discussion terkait Isu Demokrasi Masyarakat Sipil**  
**Program Democratic Reselience – YPPM**

**I. Latar Belakang**

Program “Memperjuangkan Ruang Sipil untuk Mempromosikan Ketahanan Demokratis” atau disingkat dengan nama Program DemRes dijalankan untuk merespon situasi politik Indonesia yang didominasi narasi sektarian, primordialisme dan politik identitas serta hegemoni politisi yang cenderung destruktif terhadap tatanan demokrasi. Program ini tidak akan melawan narasi-narasi dominan tersebut secara frontal, namun lebih memberi keberimbangan narasi dengan mengangkat isu-isu pembangunan dan demokrasi di ranah publik. Program ini bertujuan untuk merintis pendekatan inovatif dengan cara memperkuat lembaga demokrasi, dan meningkatkan kualitas proses demokrasi, serta meningkatkan kapasitas aktor khususnya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda dan kelompok rentan/marginal lainnya.

Masyarakat sipil dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat ini . Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan menjunjung HAM serta partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Sedangkan masyarakat sipil (*civil society*) sendiri memiliki makna sebagai sebuah entitas di luar Negara yang posisinya tepat berada diantara ruang private dan Negara. Menurut Stepan (1998), masyarakat sipil merupakan wilayah dimana ia memiliki banyak gerakan sosial dan organisasi profesi yang berjuang membentuk diri mereka menjadi suatu kesatuan demi memperjuangkan kepentingannya<sup>1</sup>, sedangkan menurut Alexis de Tocqueville masyarakat sipil adalah *non-state actor* atau lembaga-lembaga otonom(dari negara) yang mampu menimbangi kekuasaan Negara. Perspektif lain juga dikemukakan oleh Gramsci (1971) yang mengartikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme *private* yang berbeda dengan negara yang disebutnya sebagai masyarakat politik (*political society*).<sup>2</sup>

Dalam kaitanya dengan demokrasi, masyarakat sipil mempunyai peranan yang besar. Mereka mendorong terjadinya transisi dari pemerintah otoriter menjadi demokratis dan memperkuat demokrasi dengan melakukan konsolidasi. Pada dasarnya masyarakat sipil merupakan “alat” pengembangan, penguatan serta konsolidasi demokrasi dengan berbagai cara, salah satunya

---

<sup>1</sup> Jeff Haynes, *Democracy and Civil Society in The Third World Politics and New Political Movement* (Polity Press in Association with Blackwell Publishers Ltd,1997),29.

<sup>2</sup> Hadi, Otho. “Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokratisasi” <http://journal.ui.ac.id/humanities/article/view/674/642>  
(diakses pada 19 Juni 2014 pukul 19.59)

adalah memberi batasan terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak absolut dan melengkapi peran dari partai politik dalam meningkatkan partisipasi, keterampilan serta mengetahui warga melalui pendidikan politik. Masyarakat sipil juga perlu mengangkat *issue-issue* public yang kurang diperhatikan pemerintah. Kontekstualisasi masyarakat sipil dan demokrasi dapat kita lihat pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari masa ke masa dan transisi dari pemerintahan otoriter menjadi demokrasi di Indonesia.

Hubungan masyarakat sipil dengan demokrasi seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya tujuan dari masyarakat sipil atau *civil society* adalah mewujudkan pemerintah yang demokratis. Demokrasi di suatu negara dapat dikatakan baik jika masyarakat sipil di dalamnya berperan aktif baik dalam berserikat, berpendapat maupun melakukan pengawasan terhadap pemerintah, sebaliknya demokrasi di suatu Negara dianggap buruk jika masyarakat sipilnya tidak dapat menjalankan fungsi dan memperoleh hak nya.

Dari hasil rapat koordinasi antara oleh YPPM Maluku bersama perwakilan CSO , OMS Kota Ambon dan Kota Masohi , melalui diskusi yang panjang muncul berbagai isu/peristiwa baik yang berhubungan dengan GEDSI (Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial), CPP (Child Protection Policy) dan PSEAH (Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harrasment) , dan semua isu dan peristiwa yang terjadi pada kelompok Perempuan , Anak, difabel dan kekerasan seksual belum ada penyelesaian secara hukum , serta isu isu politik yang terjadi di kota Ambon maupun Maluku Tengah menjelang Pemilu ataupun Pilkada. Hal ini membutuhkan perhatian dan perjuangan dari masyarakat sipil baik di kota Ambon maupun Maluku Tengah untuk memperjuangkan ruang sipil menuju ketahanan demokrasi.

Untuk mencapai tujuan bersama dalam Memperjuangkan Ruang Sipil untuk Mempromosikan Ketahanan Demokrasi yang berhubungan dengan GESI, CPP dan PSEAH serta isu isu politik lainnya, maka YPPM Maluku bersama Partisipan CSO dan OMS Kota Ambon dan Maluku Tengah, melakukan diskusi terarah/FGD mengenai isu demokrasi masyarakat sipil yang ada di kota Ambon dan Kota Masohi.

## **II. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) ini adalah :

1. Menyelaraskan persepsi tentang isu Demokrasi Masyarakat Sipil di Kota Ambon dan Kota Masohi oleh YPPM dan Partisipan CSO, OMS dan stakeholder lainnya.

2. Terkumpulnya informasi terkait keberadaan CSO dan OMS, serta perannya dalam memperjuangkan ruang sipil untuk mempromosikan ketahanan demokrasi di Kota Ambon dan Maluku Tengah.
3. CSO dan OMS memiliki strategi yang efektif dan efisien dalam penyelesaian isu demokrasi masyarakat sipil terkait implementasi kegiatan program DemRes di kota Ambon dan Maluku Tengah.

### **III. Hasil yang diharapkan**

Hasil yang diharapkan Focus Group Discussion (FGD) adalah ;

1. Munculnya kesepakatan dan gerakan secara bersama dalam membangun isu-isu rentan dalam program Demres
2. Adanya integrasi dan kolaborasi dalam forum ruang publik secara bersama dari semua elemen

### **IV. Waktu dan Tempat Kegiatan**

Focus Group Discussion (FGD) ini akan dilaksanakan pada ;

Hari , Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021

Jam : 10.00 – Selesai

Metode : Daring / Online

Link Registrasi Peserta :

<https://docs.google.com/forms/d/1VzzNEZfHQq1RB7O1NHsq7gdl3fnr4SVXVKZZSHwaX4/edit>

YPPM akan memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) menggunakan Zoom, yang dapat diakses melalui link berikut :

<https://us02web.zoom.us/j/5614741063?pwd=Y2gwdHlIU0tRa2lKZ0pFcG5EUjllZz09>  
Meeting ID: 561 474 1063  
Passcode : 121212

### **V. Narasumber**

Narasumber dalam FGD ini adalah:

1. P2TP2A Provinsi Maluku
2. Drs. A. Namakule (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah)

## VI. Peserta

Peserta FGD Program DemRes mitra lokal YPPM dan Partisipan OSC dan OMS kota Ambon dan kota Masohi antara lain ;

No	Unsur Peserta	Nama &No. Hp	Ket.
1	Himpunan Wanita Disabelitas Indonesia (HWDI) – Kota Ambon	Ny.Mien Rumlaklak	
2	Rumah Milenieal Indonesia (RMI Wil. Maluku) – Kota Ambon	Dodie Soselisa	
3	Suara Milenial Maluku – Kota Ambon	M.Samy Al Ahyat Tuarita	
4	AMGPM Kota Ambon Cab. Bethel – Kota Ambon	Henry Timisela	
5	Majelis Ta’lim Al Ilmu Bil Man – Kota Ambon	Nona Nila	
6	Perempuan Bacarita– Kota Ambon	Elnino Fofid	
7	MAFINDO – Kota Ambon	Soleman Pelu	
8	Gerakan Perjuangan Perempuan Milenial – Kota Ambon	Iftin Yuninda Hart	
9	Fatayat NU Provinsi Maluku – Kota Ambon	Hilda Rolobessy	
10	Perwakilan pemuda	Abdul Maskur Marasabessy	
11	Klasis AMGPM Masohi – Kota Maohi	Pdt Marten Teslatu	
12	Remaja Mesjid Soahoku – Kota Masohi	Reza Wattimury	
13	Majelis Ta’lim Ukthi An Nisa – Kota Masohi	Aufa Enda Keliwouw	
14	Majelis Jemaat Mosohi – Kota Masohi	Pdt.Albert Yoris	
15	Majelis Amahei – Soahoku – Kota Masohi	Pdt Michael Pattyrane	
16	AMGPM Cab. Sabaut – Kota Masohi	Harlyn Sahulata	

17	AMGPM Cab. Siloam Amahei – Soahoku – kota Masohi	Marcelino Mainassy	
18	Organisasi YPAC (SLB) – Kota Masohi	Christalia Lesnussa	
19	IPPAMASI – Kota Masohi	Sarifudin Pattisahusiwa	
20	K3IA – Kota Masohi	Hapsa Salampessy	
21	AJI kota Ambon	Tajudin Buano	
22	MAFINDO kota Ambon	Roesda Leikawa	
23	Akademisi IAIN Ambon	Muh. Idul Launuru	

## VII. Agenda Kegiatan

Waktu	Sesi	Pemateri/Fasilitator	Metode
Pkl. 10-00-10.30	Pembukaan	Team Demres YPPM	
Pkl .10.30 -11.00	Pengantar	Direktur YPPM	
Pkl.11.00 – 12.30	Kebijakan terkait perlindungan perempuan, pemuda, anak dan difabel di kota Ambon	P2TP2A Provinsi Maluku	
Pkl. 12.30 – 13.30	ISHOMA		
Pkl. 13.30 – 15.00	Kebijakan Pemerintah Maluku Tengah terkait perlindungan perempuan , pemuda, anak dan difabel di kota Masohi	Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Dan, Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah	
Pkl.15.00 -15.30	Diskusi antar lembaga	Team YPPM	
Pkl. 15.30-16.30	Sharing pengalaman		
<b>Penutup</b>			